



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	19 November 2024	Media	khazanah
Kategori	PEMERINTAHAN	Jurnalis	suger/ant

Harian KHAZANAH

Menebar Kebaikan

KLIPING KORAN

HARI : _____

TANGGAL : _____

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DISAMBUT PJ SEKDAKO YAMINU RIZAL PPID Kota Pariaman Dinilai Tim Verfak Badan Publik KI Sumbar

Pariaman, Khazanah -- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pariaman dinilai Tim Verifikasi Faktual Badan Publik dari Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Balaikota Pariaman, Jum'at (15/11).

Kedatangan rombongan Tim Verifikasi Faktual Badan Publik dari KI Sumbar ini dipimpin langsung oleh Ketua Musfi Yendra, Komisioner Idham Fadhl beserta 3 orang lainnya itu disambut oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Yaminu Rizal, Kepala Dinas Kominfo Noviardi, Sekretaris Dinas Kominfo Riky Falantino, didampingi Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (Kabid IKP) Zasnur Rahim, Pranata Humas Agusti Rabaini dan Tim PPID Dinas Kominfo Kota Pariaman.

Yaminu Rizal mengungkapkan, dengan adanya kunjungan dan verifikasi badan publik ini oleh KI Sumbar ini, nantinya dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi PPID sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat.

"Keterbukaan informasi memberi peluang bagi masyarakat, untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean government and good governance, karena pemerintah dan badan-badan publik, dituntut untuk menyediakan in-

Dirinya berharap agar PPID Kota Pariaman, untuk Tahun 2024 ini dapat menjadi yang terbaik di Sumatera Barat, karena pihaknya terus berkomitmen untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk itu.

"Selama 4 tahun terakhir, kita selalu mendapat Peringkat III, dengan komitmen kuat dari atasan, kita berharap di tahun

sebagai wujud kita untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Sumatera Barat.

Sementara itu, Ketua KI Sumatera Barat Musfi Yendra mengatakan bahwa Keterbukaan Informasi Publik adalah amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang, bahwa Keterbukaan Informasi

ini kita dapat menjadi yang terbaik," ulasnya.

Untuk Tahun 2025 mendatang, katanya, Pemko Pariaman berkomitmen untuk mengadakan PPID Award tingkat Kota Pariaman, dan memfasilitasi PPID di tingkat Desa untuk menjadi PPID Mandiri, selain badan publik yang ada di organisasi yang ada di Kota Par-

Publik dan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

"Dari Ribuan badan publik

yang ada di Sumatera Barat, hanya 460 Badan Publik yang telah mempunyai syarat, dan setelah melalui verifikasi dan pengisian kuisioner, tersisa 160 badan publik, yang dibagi 10, besar terbaik di setiap kategori, dan salah satunya PPID Kota Pariaman yang masuk 10 besar, dan nanti kalau dinyatakan lolos 3 besar, akan presentasi di KI Sumbar," ujarnya.

Pria berkacamata ini mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi PPID Kota Pariaman yang konsisten mendapat predikat Peringkat ke III Terinformatif Badan Publik se Sumbar selama 4 Tahun berturut-turut.

"Untuk itu di Tahun ini kami menginginkan agar PPID Kota Pariaman dapat belajar ke Bawaslu Kota Pariaman, yang sudah meraih peringkat 1 empat kali berturut-turut, dan tiga kali berturut-turut meraih predikat Informatif oleh Komisi Informasi Sumbar," jelasnya

Dikatakan, pentingnya Keterbukaan Informasi Publik bagi seluruh Badan Publik untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk mewujudkan clean government and good governance, sesuai dengan Pak Sekda katakana: serta untuk meningkatkan partisipasi publik.

"Badan Publik terinformatif harus bisa memberi nilai lebih dengan menjalin kolaborasi dengan badan publik lainnya dalam rangka memberikan pendampingan atau menjadi percontohan seperti apa tata kelola dan standar layanan ir

